

**PENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF DAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA SKPD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Oleh:

**Jaka Hendrawan
Kamaliah
Azhari**

**Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru – Indonesia
e-mail: jakahendraw@gmail.com**

Abstract

This study aims to look at the Effects of Preventive Monitoring, Surveillance Detective and Effectiveness Against Performance-Based Budgeting on Budgetary Control of the Regency Kuantan Singingi. The population in this study are all compulsory service Performance Accountability Report Government Agencies in the County Government Kuantan Singingi, Riau province, amounting to 29 offices. While the sample is employees who participate in the budgetary participation Kuantan Singingi District Government as a whole, amounting to 93 people. To test the hypothesis of the study used multiple regression analysis method with the help of SPSS software. The results show that preventive control does not significantly influence the effectiveness of budgetary control. While the detective monitoring and performance-based budgeting significantly influence the effectiveness of budgetary control with empirical studies on Kuantan Singingi district offices. Donations effect of preventive monitoring, supervision and performance-based budgeting detective on the effectiveness of budgetary control with empirical studies in the Kuantan district offices Singingi by 52.9%.

Keywords: Effect of Preventive Monitoring, Surveillance Detective, Performance Based Budgeting and Budgetary Control Effectiveness.

PENDAHULUAN

Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Dengan adanya otonomi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap

aparatus yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001).

Pada Kabupaten Kuantan Singingi, tingkat realisasi anggaran dari setiap SKPD dinilai masih banyak yang tidak mencapai target. Data tingkat pencapaian realisasi anggaran dapat kita peroleh dari informasi yang dipublikasikan pada media masa. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tingkat realisasi anggaran rata-rata SKPD yang ada berkisar pada 80 %. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Disamping itu BPK RI juga menemukan terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi kelemahan hasil audit tersebut, diantaranya adalah (1) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum membuat peraturan teknis terkait pengelolaan dan manajemen kas; (2) Pengelolaan kas non anggaran belum ditetapkan dengan peraturan Bupati; dan (3) Proses penyusunan dan penetapan APBD dan APBD Perubahan tidak tepat waktu.

Permasalahan lain yang ditemukan oleh BPK terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Sisa UYHD TA 2012 terlambat disetorkan ke Kas Daerah; (2) Terdapat keterlambatan penyetoran potongan perhitungan pihak ketiga TA 2012 pada Bendahara Umum dan Bendahara Pengeluaran; dan (3) Terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa pos seperti biaya transportasi, akomodasi dan honorarium instruktur/ narasumber; honorarium panitia pelaksana kegiatan; honorarium tim pelaksana uji jaringan distribusi listrik; dan pengadaan bibit karet untuk peremajaan kebun karet tua; (4) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang belum disetor ke Kas Daerah; dan (5) Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Dan untuk tercapainya efektifitas pengendalian anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat menggunakan pengawasan preventif, pengawasan detektif serta mengembangkan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Sarwoto (1968:93) dalam Shinta (2000) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

Pengawasan dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986:136) dalam Shinta (2000), tujuan pengawasan:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.

- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- d. Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Keputusan Menteri Keuangan no 152 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pengawasan Preventif. Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara.
- b. Pengawasan detektif. Pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan.

Pengawasan Preventif

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

Menurut Refrisond (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002: 95) mengatakan pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut Refrisond (2000:123), tujuan pengawasan preventif secara terinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.
- c. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Detektif

Porter (1992:177) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiagakan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Salah satu contoh pengawasan detektif adalah suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Menurut Refrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen

laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.

Sebagaimana yang dikemukakan Revrisond (2000:123) pengawasan detektif ada dua, yaitu dari dekat dan dari jauh. Bukhori (1992) dalam Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara yuridis, definisi anggaran berbasis kinerja dirujuk pada pasal 7 ayat (1) PP Nomor 21 tahun 2004, yakni penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Secara konseptual, definisi penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Secara teori anggaran berbasis kinerja menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan. Melalui proses anggaran kinerja, pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program dan pelayanan kemudian pemerintah daerah membuat target pencapaiannya.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah :

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran.
4. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur (indikator) kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Bastian (2006) anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. 'Performance budgeting' mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai 'output measurement' sebagai indikator kinerja organisasi.

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi, misi dan rencana strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai

berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Efektifitas Pengendalian Anggaran

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118).

Revrison (2000:118) menjelaskan bahwa pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Indra (2006:180) mengatakan faktor penentu efektifitas suatu anggaran dilihat dari segi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran
- b. Fleksibilitas dalam fiskal
- c. Tingkat pengeluaran yang diharapkan
- d. Fasilitas dalam pemberlakuan tingkat pajak
- e. Batasan proses anggaran
- f. Waktu dan informasi
- g. Manajemen keuangan
- h. Waktu yang salah dalam melepaskan dana
- i. Biaya yang terlalu besar

j. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan dana

k. Hambatan sumber daya manusia.

Efektivitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian (Kenis, 1979 dalam Mardiasmo, 2004). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan

Pendlebury (2000) menjelaskan pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Salah satu upaya tersebut adalah pengawasan.

Pengaruh antara Pengawasan Preventif dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas maka hubungan antara pengawasan preventif dengan efektifitas anggaran saling mengikat, pengawasan preventif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak

terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut, jadi pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap pengendalian anggaran.

Dalam penelitian Arif Fuadi (2013) dan Arif Fajri (2009) menghasilkan pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh antara Pengawasan Detektif dan Efektifitas Pengendalian

Revrisond (2000:118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Dalam penelitian Arif Fuadi (2013) dan Arif Fajri (2009) menghasilkan pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh antara Penganggaran Berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Anggaran kinerja berbasis kinerja menurut Halim (2007) adalah merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:28) anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya penciptaan hasil kinerja atau *outopu* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional dalam anggaran berbasis kinerja, serta untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya operasional maka diperlukan perencanaan dan pengendalian. Menurut Jones dan Pendlebury diterjemahkan oleh Arifin Sabeni (2000) menjelaskan bahwa : “Anggaran menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian.”

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran, dalam hal ini anggaran berbasis kinerja dengan suatu cara yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu atau departemen untuk

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

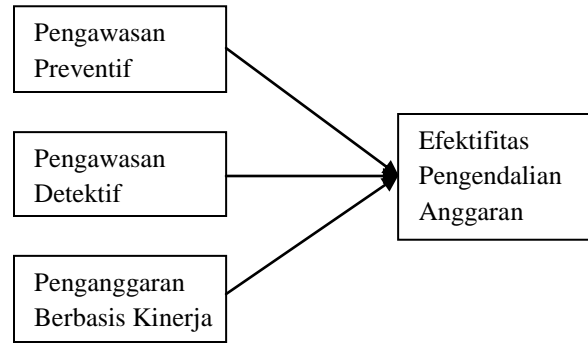
Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai alat pencapaian tujuan dan pengendalian yang didasarkan pada efektivitas anggaran.

Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara *input*, *output* dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab (*akuntability*) dan keterbukaan (*transparancy*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Hindri (2006) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan preventif dengan efektivitas pengendalian keuangan daerah pada penelitian tersebut. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Model Penelitian

Pengaruh antara pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



Gambar: Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
- H₂ : Pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
- H₃ : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu sebulan.

Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel (*sample*) yaitu anggota populasi yang disebut dengan elemen populasi (Indriantoro, 2002).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang berjumlah 29 SKPD. Setiap SKPD dibagikan 5 (lima) buah kuesioner. Sampel penelitian ini adalah golongan dari eselon II, III Dan IV yang bertugas di Instansi Pemerintah daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel tersebut adalah pegawai yang menjabat posisi tersebut ikut serta dalam anggaran sehingga dapat memberikan informasi kepada peneliti, tentang sejauh mana SKPD ikut serta dalam partisipasi penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan

Dari data yang ada jumlah SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1.415 populasi. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Untuk menentukan sampel minimum yang akan diambil dari populasi persamaan *slovin* (Husein Umar, 2000: 108). sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = nilai toleransi sebesar 10% atau (0,1)

$$n = \frac{1415}{1 + (1415 \times 0,1)^2} = 93.39934 = 93$$

Berdasarkan persamaan di atas, jumlah sampe minimal yang akan di ambil dari populasi pegawai adalah 93 orang .

Metode Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Penentuan validitas data menggunakan *Correlation Coefficients Pearson* dengan menggunakan SPSS (Indrianto dan Supomo, 2002). Hasil korelasi antar variabel dibandingkan dengan

range angka korelasi -1, 0 dan + 1 pada tingkat signifikan 0,05 apabila r_{hitung} mendekati angka 1, maka instrumen tersebut valid. Sebaliknya jika r_{hitung} mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen penelitian tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen yang digunakan. Pengujian reliabilitas ini menggunakan uji statistik *cronbach's alpha* dengan menggunakan indeks numeric yang dibuat koefisien. Instrumen yang digunakan dalam variable dikatakan *reliable* (handal) apabila memiliki koefisien alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2009). Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan aplikasi SPSS.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS dengan persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi Parsial

e = Variabel Pengganggu (error)

X_1 = Pengawasan Preventif (tdk ngrh)

X_2 = Pengawasan Detektif

X_3 = Penganggaran berbasis kinerja

Y = Efektifitas Pengendalian Anggaran

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Bila *tolerance* kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila $VIF > 10$, berarti variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel independen lainnya. Sebaliknya jika $VIF < 10$ maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam persamaan regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Imam Ghazali, 2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW). Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat autokorelasi positif. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika angka DW diatas +2, maka terdapat autokorelasi negatif.

Uji Hipotesis (Hasil Uji t / uji koefisien regresi secara parsial)

Pengujian dilakukan dengan dua arah (*two tail*) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = $n-k$. Jika nilai $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji F (uji koefisien regresi secara simultan)

Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Bila F hitung $> F$ tabel, variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel independen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 145 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 112 kuesioner (77,24%), dan sebanyak 33 kuesioner (22,76%) tidak mendapat respon dan atau tidak dikembalikan. Dari kuesioner yang kembali, sebanyak 15 kuesioner (10,34%) tidak dapat dianalisis, dan yang dapat dianalisis sebanyak 97 kuesioner (66,90%). Untuk

melihat lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Karakteristik Responden

Untuk melihat responden berdasarkan karakteristik tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 : Identitas Responden

Karakteristik	F	%
Jenis Kelamin		
1, Laki-laki	64	65,98
2, Perempuan	33	34,02
Jumlah	97	100,00
Usia		
≤ 30 Tahun	8	8,25
30-49 Tahun	42	43,30
≥ 50 Tahun	47	48,45
Jumlah	97	100,00
Pendidikan		
SMA	2	2,06
Diploma	13	13,40
Sarjana	63	64,95
Magister	21	21,65
Jumlah	97	100,00
Masa Kerja		
< 10 tahun	22	22,68
10-20 tahun	54	55,67
> 20 tahun	21	21,65
Jumlah	97	100,00

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5 % untuk uji 2 sisi. Jika r hitung $>$ r tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika r hitung \leq r tabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Nilai r tabel dapat diperoleh dengan persamaan $N - 2 = 97 - 2 = 95 = 0,200$. Dan r hitung diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,534 – 0,670	0,200	Valid
Pengawasan Preventif	0,481 – 0,772	0,200	Valid
Pengawasan Detektif	0,439 – 0,633	0,200	Valid
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,346 – 0,785	0,200	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Sama halnya dengan pengujian validitas, pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cornbarh's Alpha*. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang digunakan sebagai indikator dari variabel. Jika koefisien alpha yang dihasilkan $\geq 0,6$, maka indikator tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas

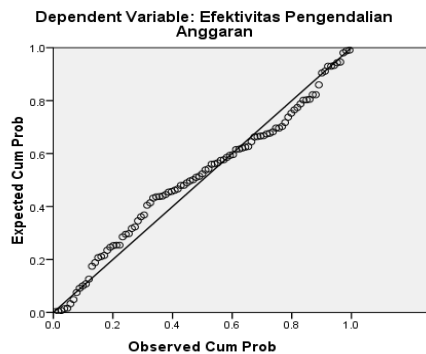
Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,6	0.706	Reliabel
Pengawasan Preventif	0,6	0.878	Reliabel
Pengawasan Detektif	0,6	0.614	Reliabel
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,6	0.880	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan melihat *probability plot*. Uji secara *probability plot* adalah dengan melihat data pada garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Grafik Normal Probability P-Plot

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat grafik *Normal Probability P-Plot*. Dari gambar diatas terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal. Berdasarkan gambar tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolineritas bisa dilihat berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4 : Hasil Uji Multikolineritas

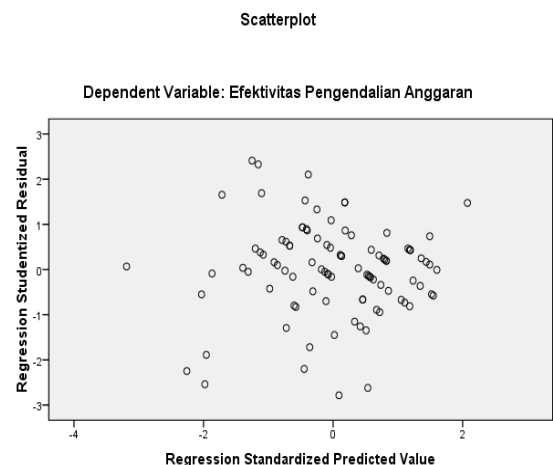
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengawasan Preventif	0,987	1,013
Pengawasan Detektif	0,871	1,148
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,871	1,148

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,013; 1,148 dan 1,148 < 10 dan *tolerance* sebesar 0,987; 0,871 dan 0,871 > 0,10. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan residual error yaitu *ZPRED*. Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Gambar diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Tidak terjadinya

autokorelasi dalam model regresi bila nilai DW berada diantara -2 sampai dengan 2.

Tabel 5 : Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Lower	Upper
1,712	-2	+2

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa $-2 < DW < +2 = -2 < 1,712 < +2$. Maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6 : Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.
		B	SE	Beta
1	(Constant)	2.217	2.845	
	Pengawasan Preventif	.046	.030	.111
	Pengawasan Detektif	.524	.088	.457
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.130	.025	.401

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 2,217 + 0,046 X_1 + 0,524 X_2 + 0,130 X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menggunakan uji t. Caranya adalah dengan membandingkan

antara t hitung dengan t tabel. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, namun jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Adapun nilai t tabel pada penelitian ini (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan persamaan:

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= n - k - 1 ; \alpha/2 \\ &= 97 - 3 - 1 ; 0,05/2 \\ &= 93 ; 0,025 \\ &= 1,986 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai t hitung untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian pertama yang diujikan yaitu pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji hipotesis pertama sebagai berikut:

Tabel 7 : Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.		
		B	SE	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Pengawasan Preventif	.046	.030	.111	1.551	.124

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung variabel pengawasan preventif sebesar $1,551 < 1,986$ dan signifikansi $0,124 > 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis ditolak. Artinya pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Tidak berpengaruhnya pengawasan preventif secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran karena dinilai kurang efektifnya sistem pengawasan ini dilakukan. Walaupun pengawasan preventif memiliki kelebihan dimana manajemen dapat membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan, biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya cukup mahal. Banyak kegiatan yang tidak memungkinkan dimonitor secara terus-menerus, dan pengawasan yang berlebihan cenderung membuat produktivitas akan menurun.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian pertama yang diujikan yaitu Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji hipotesis pertama sebagai berikut:

Tabel 8 : Hasil Uji Hipotesis Kedua

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.		
		B	SE	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Pengawasan Detektif	.524	.088	.457	5.985	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung variabel pengawasan detektif sebesar $5,985 > 1,986$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuadi (2013). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Dengan kegiatan yang telah diselesaikan maka dapat diketahui bagian-bagian atau proses-proses yang tidak terjadi semestinya.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian pertama yang diujikan yaitu Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji hipotesis pertama sebagai berikut:

Tabel 9 : Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.	Unstand. Coeff.	
		B	SE	B	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.130	.025	.401	5.258	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung variabel penganggaran berbasis kinerja sebesar $5,258 > 1,986$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salawali (2013). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Sistem penganggaran yang berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai

dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Dengan sistem tersebut diharapkan tercipta efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka Pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Namun jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian simultan sebagai berikut:

Tabel 10 : Hasil Uji F (Uji Simultan)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275.135	3	91.712	34.785	.000 ^a
	Residual	245.195	93	2.637		
	Total	520.330	96			

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas diketahui F hitung sebesar 34,785 dengan signifikansi 0,000. Diketahui F tabel (pada tingkat signifikansi 5%) dengan persamaan $n - k - 1$; $k = 97 - 3 - 1$; $3 = 93$; $3 = 2,703$. Dengan demikian diketahui F hitung ($34,785 > F_{tabel} (2,703)$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah bahwa pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh

signfikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan adalah untuk melihat sumbangan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai kofeisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 4.16 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.514	1.62373

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai R^2 sebesar 0,529. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 52,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 47,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah menganalisis pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Implikasi dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kuantan Singingi untuk dapat mempertahankan efektivitas pengendalian anggarannya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran sudah tergolong baik.
2. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengawasan detektif mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu diharapkan kepada SKPD agar senantiasa melakukan pengawasan detektif pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi
3. Penelitian hanya membahas pengaruh pengawasan preventif, pengawasan

detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri Arif. (2009). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah.
- Fuadi Arif. (2013). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kota Bukittinggi).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementrian Keuangan
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Porter, Thomas, (1992). EDP Pengendalian dan Auditing. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Revrison Baswir. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Widjaja Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.